

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak dilakukannya reformasi perekonomian, angka pertumbuhan perekonomian China mengalami kenaikan yang sangat signifikan pertahunnya. Dalam kurun waktu 30 tahun China mengalami kemajuan perekonomian yang didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam benda. Pada tahun 2001 China bergabung ke dalam WTO untuk memberikan posisi nyaman bagi China sebagai pusat perdagangan dan manufaktur dunia. China menjadi tujuan utama ekspor terbesar dari 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Selain perekonomian China, investasi juga terus mengalami pertumbuhan yang menjadikan China sebagai sumber dan penerima investasi terbesar kedua di dunia (Reditya, 2021).

Bukti kesuksesan reformasi perekonomian China ini mencapai titik tertingginya pada era Xi Jinping. Xi Jinping mulai memimpin China pada tahun 2013. Gagasan-gagasan yang dia kemukakan pada awal pemerintahannya berfokus pada model dan cara menjalin hubungan dengan berbagai negara. Begitu juga memperluas koordinasi masalah-masalah global dalam berbagai macam isu-isu yang sedang terjadi di dunia (Lampton, 2013).

Xi Jinping pertama kali mengumumkan strategi *Belt and Road Initiative* pada tahun 2013. Strategi tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Serikat (Kuo & Kommenda, 2018). China menerapkan kebijakan *Belt and Road Initiative* karena beberapa kebijakan China biasanya

dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Faktor domestik yang dimana terdapat kepentingan nasional China dalam mengamankan energinya di Asia Tengah dengan mengembangkan kerjasama dengan beberapa negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Sri Lanka. *Belt and Road Initiative* bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Asia Selatan dengan memperluas jaringan infrastruktur. Dengan upaya ambisius ini, China bertujuan untuk memperdalam hubungan dengan tetangganya di Asia Selatan dan mencari lingkungan yang saling menguntungkan berdasarkan peningkatan infrastruktur dan hubungan perdagangan yang lebih kuat. Warisan *Belt and Road Initiative* terletak pada sejarah panjang proyek yang dipimpin China di Asia, sebuah babak baru dalam investasi China di wilayah tersebut (Passalacqua, 2016).

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, China mencapai posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hal ini menjadi ancaman bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentu tidak ingin posisinya terusik. Amerika Serikat pada tahun 2017 memiliki GDP sebesar US\$ 19,480 Miliar (Knoema, 2022). Melihat dari pertumbuhan index produksi Amerika Serikat pada tahun 2021, menunjukkan Pada bulan November, output manufaktur naik 0,7% mencapai level tertinggi sejak Januari 2019. Meskipun terdapat peningkatan pada produksi kendaraan bermotor dan suku cadangnya pada bulan November, produksi untuk industri tersebut berada 5,4% di bawah tingkat produksi tahun sebelumnya. Pada sektor barang tidak tahan lama seperti: pabrik tekstil dan produk, kertas, serta produk plastik dan karet semuanya mencatat kenaikan lebih dari 1% Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada sektor perindustrian sebagai sektor

utama perekonomian Amerika Serikat (Federal Reserve System, 2021).

Kebijakan Amerika Serikat pada era Obama menerapkan kebijakan *Pivot to Asia*. Kebijakan ini berfokus pada perekonomian, diplomasi, dan keamanan Amerika Serikat di Asia Tenggara mendapat dorongan signifikan pada pemerintahan Obama. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekuatan dan pengaruh China di kawasan (Clinton, America's Pacific Century, 2011).

Pada kebijakan ini Obama mengemukakan tiga poin utama yaitu, pertama, peralihan ke Asia dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen pemerintahan Obama untuk meredakan konflik di Afghanistan dan Irak dan sebaliknya memberikan prioritas lebih besar untuk memfokuskan kekuatan dan sumber daya Amerika Serikat ke kawasan Indo-Pasifik yang dinamis. Kedua, pemerintahan Obama memaparkan kasus strategis yang terperinci mengenai pentingnya Indo-Pasifik bagi kepentingan kebijakan dalam dan luar negeri jangka panjang Amerika Serikat. Ketiga, sebuah rencana aksi diajukan untuk memperkuat pengaruh Amerika di kawasan melalui interaksi ekonomi yang lebih mendalam, keterlibatan diplomatik yang lebih besar, upaya yang lebih kuat untuk mempromosikan hak asasi manusia dan demokratisasi, dan penguatan kehadiran militer Amerika Serikat. Sehingga poros politik Amerika Serikat menuju Indo-Pasifik menjadi salah satu inisiatif kebijakan luar negeri paling menonjol pada pemerintahan Obama (Gill, Goh, & Huang, 2016).

Setelah kepemimpinan Obama berakhir. Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Namun pada era Trump, perekonomian Amerika Serikat terjadi defisit perdagangan. Nilai impor barang Amerika Serikat kepada China sebesar US\$539,5 Miliar pada

2018 dan hanya terjual sebanyak US\$ 120,3 Miliar. Sehingga menimbulkan defisit perdagangan yang memiliki perbedaan nilai yang tinggi diantara keduanya yang bernilai US\$ 419,2 Miliar (Rushe, 2019).

Melihat perbedaan angka tersebut tentu posisi China di perekonomian global dapat mengancam posisi Amerika Serikat sebagai posisi pertama dalam perekonomian Internasional. Amerika Serikat tentu tidak tinggal diam hanya melihat perkembangan perekonomian China. Trump sebagai pemimpin negara Amerika Serikat tentunya memikirkan berbagai upaya untuk mencegah pertumbuhan perekonomian China supaya terhambat dan tidak mengusik posisi Amerika Serikat sebagai negara Adidaya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan data yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis mencoba untuk menganalisa tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam menghadapi pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Sehingga dapat dirumuskan menjadi :

“Bagaimana kebijakan Amerika Serikat masa Donald Trump dalam menghadapi perkembangan ekonomi China?”

1.3 Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam mempermudah penulis untuk menegaskan teori yang dijadikan sebagai landasan kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang dipelajari. Dengan alasan tersebut dapat menjawab rumusan masalah diatas maka penulis akan menggunakan teori yang dinamakan Model Pengambilan Keputusan milik Snyder tahun 1985 dan Teori Kebijakan Luar Negeri tahun 1983.

A. Model Decision Making Richard Snyder (1985)

Teori dasar dari gagasan ini adalah bahwa tindakan internasional terdiri dari keputusan yang dibuat oleh organisasi politik domestik yang diakui; para pemimpin negara, baik individu maupun berkelompok, berperan sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. (Jensen, 1982). Menurut perspektif ini, analisis- analisis berkaitan dengan struktur dan prosedur yang melibatkan pengambilan keputusan politik luar negeri, serta analisis keputusan-keputusan tertentu.

Pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kepemimpinan, persepsi, dan sistem kepercayaan para pembuat keputusan, arus informasi di antara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap keputusan mereka. (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Penelitian dari perspektif ini juga memperhatikan aspek situasional ketika proses pengambilan keputusan dilakukan; misalnya, apakah proses ini dilakukan dalam situasi tertekan, krisis, atau berisiko. (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Menurut model ini, para pembuat keputusan akan memperhatikan dan mempertimbangkan apa pun yang memengaruhi politik internasional. Keunggulan model ini, yaitu aspek manusia, dianggap lebih efisien daripada proses politik di luar negeri. Dengan demikian, faktor-faktor berikut adalah yang paling signifikan yang dapat memengaruhi keputusan yang dibuat dalam hal politik internasional:

1. Alasan para pembuat keputusan (prinsip dan standar yang dipegang)
2. Arus informasi yang mengalir di antara mereka, atau jaringan informasi

3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
4. Keadaan untuk mengambil keputusan, juga disebut sebagai keadaan untuk keputusan, mengacu pada karakteristik situasi yang ada pada saat pengambilan keputusan, seperti apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Dalam berbagai situasi, negara bertanggung jawab untuk membuat keputusan dalam hubungan internasional, dan cara negara tersebut merespon tergantung pada situasi tersebut. Kemudian terdapat ciri-ciri kerangka acuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempertimbangkan bagaimana kebijakan internasional dapat diambil. Tujuan nasional dalam proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan secara sederhana menjadi kategori-kategori berikut: kritik, pembaruan, pengendalian, deskripsi, dan prediksi. (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Pemimpin harus dapat mempertimbangkan situasi saat ini dan reaksi warga negara atau negara lain. Meskipun negara dianggap sebagai aktor utama di dunia politik, sikap saling ketergantungan yang kuat dianggap dapat memengaruhi bagaimana dan seberapa efektif kekuasaan sebuah negara. Dalam beberapa kasus, hasil politik sebuah negara dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan militer dan sumber daya, yang menghasilkan hubungan kekuasaan antar negara (Burchill, 2005).

Kebijakan luar negeri suatu negara didukung oleh sejumlah faktor. Menurut Snyder, ada dua komponen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara: faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk hal-hal yang berasal atau terjadi di dalam negeri, seperti kondisi dan keadaan lingkungan negara tersebut. Faktor internal lebih

menekankan hubungan antara masyarakat dan negara di bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan, dan pertahanan dan keamanan. Faktor internal, seperti bagaimana masyarakat diatur dan dioperasikan, seperti politik dalam negeri, opini publik, sikap publik, lokasi geografis, dan kekuasaan negara, lebih mementingkan kondisi politik dalam negeri; peran partai politik dalam mengatur pengambilan kebijakan adalah salah satu faktor internal yang paling penting. Sistem politik suatu negara memungkinkan banyak yang difokuskan pada peran partai politik. Dalam persaingan satu sama lain, partai politik berusaha untuk mencapai tujuan mereka sendiri, yaitu menang dalam pemilihan, sehingga mereka dapat mendukung masalah bukan untuk masalah itu sendiri, tetapi untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002).

Faktor eksternal mengacu pada hubungan antara negara dan negara sebagai aktor dalam sistem internasional. Faktor eksternal juga dapat didefinisikan sebagai faktor yang berasal dari luar negara, seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, dan konflik internasional. Faktor eksternal juga dapat didefinisikan sebagai kondisi yang terjadi di luar wilayah negara, seperti tindakan dan reaksi negara lain, serta tidak adanya organisasi internasional dan regional. Kepentingan nasional menentukan tindakan sebuah negara di tingkat internasional. Organisasi internasional termasuk negara lain yang dapat menempatkan tekanan pada negara dalam analisis internasional. Keputusan dibuat oleh organisasi internasional seperti PBB, organisasi regional, dan organisasi global lainnya. Sebuah negara lebih mungkin dipaksa untuk mengikuti aturan dan peraturan organisasi internasional karena tuntutan internasional.

Peluangnya adalah untuk mempengaruhi preferensi negara. Kebijakan negara tersebut di luar negeri dapat berdampak pada negara lain di skala regional dan global (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002).

B. Teori Kebijakan Luar Negeri (1983)

Politik luar negeri adalah strategi atau program atau strategi yang dirancang atau dikembangkan oleh para pengambil keputusan suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain dan entitas internasional yang ingin mencapai tujuan tertentu dan mengenai kepentingan atau keberadaan nasional yang akan ditetapkan di luar negeri. Kebijakan tersebut tidak memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri juga merupakan keputusan suatu negara untuk melihat fenomena internasional, berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut dan strategi yang direncanakan oleh para pengambil keputusan (Zakky, 2018).

K.J. Holsti mempresentasikan teori Kebijakan luar dimana menjelaskan suatu gagasan dalam sebuah rumusan yang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah atau mencoba mengadakan perubahan di suatu wilayah tertentu. Ada perbedaan tujuan, kebijakan, dan politik luar negeri, setiap negara harus memiliki keseimbangan dan kesepahaman dalam kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Kebijakan luar negeri adalah salah satu langkah yang diambil oleh setiap negara untuk mengambil keuntungan darinya dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh keuntungan dan berusaha menjaga keamanan bersama. Ada tiga rumusan dalam teori politik luar negeri yang mewakili tujuan negara dalam membuat atau melaksanakan politik luar negeri, antara lain:

1. Nilai tujuan negara merupakan salah satu faktor terpenting dorongan untuk merumuskan politik luar negeri. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan atas dasar tujuan suatu negara.
2. Dalam melakukan kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu yang harus dicapai dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Jenis tuntutan tujuan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi negara anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan selesai.

Dalam kemampuannya merencanakan dan melaksanakan kebijakan luar negeri, suatu negara juga memiliki dasar dan seperangkat asumsi dan tujuan khusus dengan mempertimbangkan keamanan nasional. Meskipun komponen yang digunakan dalam politik luar negeri terdapat pandangan, sikap negara lain, keputusan dan tindakan yang akan diambil.

Setiap negara dalam sistem politik internasional bertanggung jawab atas keamanan dan kemerdekaannya sendiri (perebutan kekuasaan), posisi negara lain dipandang sebagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan dasarnya. Secara umum, negara merasa tidak aman, menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan di antara mereka sendiri. Mereka sangat berkonsentrasi pada pasukan mereka sendiri dengan tujuan mencegah serangan dari negara lain (Holsti, 1983).

Menurut Graham T. Allison dalam pembentukan kebijakan luar negeri, mengatakan: *“Keamanan nasional dan kepentingan nasional adalah kategori utama di mana tujuan strategis dirancang. Negara mengupayakan keamanan dan*

banyak tujuan lainnya. Setiap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi olehnya.” Banyak faktor dan pelaku domestik berasal dari institusi yang berbeda dan memiliki keunggulan, sehingga menghasilkan berbagai manfaat. Akan tetapi, adanya kepentingan-kepentingan yang telah ada sebelumnya dapat menimbulkan suatu kebijakan yang karena pertimbangan dan konsekuensi dari pembuatan kebijakan, kemungkinan akan memenuhi atau menciptakan kepentingan nasional. Graham T. Allison juga mengatakan bahwa "pemerintah memilih kebijakan yang memaksimalkan tujuan dan sasaran strategis" (Allison G. T., 1969).

. Tujuannya adalah agar dewan membuat keputusan atau tindakan yang memaksimalkan tujuan strategis dan objektif. Model aktor rasional ini mendorong pemerintah untuk memilih kebijakan yang memaksimalkan tujuan dan sasaran strategis. Urutan konsep agar pengolahan teori ini menjadi lebih jelas dan terstruktur, yaitu:

1. *National Actor*, yang dimana aktor rasional adalah pemerintah atau bangsa yang dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional. Aktor ini memiliki serangkaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan memiliki konsekuensi yang lebih sedikit daripada keputusan yang ada.
2. *The Problem*, dengan adanya masalah membuat negara membuat keputusan strategis untuk negaranya.
3. *Static Selection*, tindakan yang terkait dengan masalah adalah apa yang dipilih negara sebagai solusi. Dengan demikian, fungsi dipahami sebagai pilihan terbaik di antara kemungkinan lainnya.
4. *Action as Rational Choice*, dimana tindakan atau keputusan adalah pilihan yang rasional.

Model aktor rasional, yang dirumuskan oleh Graham T. Allison, adalah cara negara menentukan kebijakan luar negerinya. Semua keputusan dipilih oleh pemerintah sebagai bentuk kebijakan mengetahui tindakan strategis. Kepentingan nasional dan keamanan nasional adalah yang terpenting ketika membentuk atau merumuskan kebijakan luar negeri. Teori aktor rasional adalah teori untuk menjawab pertanyaan apakah keputusan yang dibuat adalah yang terbaik dan dapat disebut sukses jika realisasi kepentingan aktor dalam lingkungan internasional (Allison G. T., 1969).

1.4 Hipotesis

Strategi Amerika Serikat dalam menghadapi perkembangan perekonomian China yang dilakukan oleh Donald Trump dengan:

“Amerika Serikat pada era Donald Trump menetapkan kebijakan tarif yang lebih tinggi terhadap impor produk China sebagai upaya menekan perekonomian China.”

1.5 Jangkauan Penelitian.

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah seperti skripsi diperlukan jangkauan penelitian, yang berguna untuk menghindari adanya penyimpangan pada bahasan dan sebuah pembuktian terhadap sebuah rumusan masalah juga hipotesa yang telah dijabarkan. Oleh karena itu penulisan skripsi berjudul “Kebijakan Amerika Serikat dalam Menghadapi Perkembangan Perekonomian China pada Era Donald Trump” penulis memberikan batasan dalam pembentukan kebijakan Amerika Serikat pada rentang tahun 2017 hingga 2021 saja. Kemudian membahas bagaimana Amerika Serikat membentuk kebijakan yang berguna untuk membatasi lonjakan perekonomian China yang semakin besar.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan artikel, jurnal, maupun *website* untuk dijadikan referensi bacaan yang dirasa relevan dengan topik dari penelitian tentang langkah yang dilakukan Amerika Serikat dalam mengatasi peningkatan perekonomian China. Penulis menggunakan pendekatan Model Pengambilan Keputusan milik Snyder dan Teori Kebijakan Luar Negeri sebagai alat untuk menganalisis isu dalam penelitian ini (Rahmatullah, 2022).

Dalam melakukan riset kualitatif, penulis mengumpulkan data untuk dianalisis menggunakan teori yang sudah ditentukan diatas. Hasil analisis kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis. Penulis berperan dalam melakukan pengumpulan serta pengujian data atau dokumen yang diperlukan. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa instrumen bantu untuk menunjang penelitian, antara lain: buku, laptop, ponsel, dan jaringan internet. Keseluruhan instrumen digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi perkembangan perekonomian China pada era Donald Trump.

1.7 Sistematika Penelitian

Di samping dengan pemaparan yang penulis susun di atas, terdapat salah satu unsur penulisan yang penting dalam sebuah karya ilmiah, sistematika penulisan dibutuhkan agar penulis tidak menyalahi kaidah penulisan ilmiah yang telah dibuat dalam beberapa penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis,

jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini penulis akan membahas tentang situasi dinamika hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China. Kondisi ekonomi Amerika Serikat Pasca Krisis 2008, Hubungan Dagang Amerika Serikat dengan China.

Bab III, di dalam bab ini terdapat bahasan tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang dibentuk oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk menghalau peningkatan perekonomian China yang berkembang sangat pesat. Penulis juga mencantumkan respon China terhadap Amerika Serikat.

BAB IV, bab ini merupakan kesimpulan menyeluruh sebagai pembuktian dari hipotesis yang diajukan.